



LAPORAN

PERAN DANA DESA DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH

KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
TAHUN 2018

PERAN DANA DESA DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH

OLEH:

CUT BADRATUN NAVIS

(150604077)

Penelitian Ini Terselenggara Atas Kerjasama BAPPEDA Kota Banda Aceh Dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2018

TIM PENYUSUN

PERAN DANA DESA DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDA ACEH

- 1. Ir. Gusmeri, MT
- 2. Dr. Zaki Fuad M. Ag
- 3. Parmakope, SE., MM
- 4. Fahmi Yusuf, SE., M. Si
- 5. Dr. Laila Wijaya, SP, M. Env. Plan
- 6. Cut Badratun Navis
- 7. Liza Raviana

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh " proposal ini disusun guna memenuhi kerja sama dengan pihak Bappeda Kota Banda Aceh dengan Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Penulis menyadari, bahwa proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada dosen dan juga pembimbing.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Manfaat Penelitian	
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Landasan Teori	
2.1.1 Pengangguran	
2.1.2. Jenis-Jenis Pengangguran	
2.2.1 Dana Desa	
2. Pembangunan Fisik.	
3. Pengelolaan Dana Desa	
2.2.2 Dampak Dana Desa	
2.3 PenelitianSebelumnya	
2.4 Hipotesis	
2.1 111p0@36	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Rancangan Penelitian	
3.2. Populasi	
3.3. Teknik Sampling	
3.4. Sampel	
3.5. Lokasi Penelitian	
3.6. Jenis Data Penelitian	
3.7. Teknik Pengumpulan Data	
3.8 Variabel Penelitian.	
3.9 Model Analisis	
3.10.1 Uji Validitas dan Reabilitas	40
	41
J.10.2 / Isumsi Musik	71
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	42.
4.1. Gambaran umum penelitian	
4.2. Karakteristik Responden	
•	44
	45
	49
4.6. Hasil Analisis Liniear Berganda	

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis	56
4.8 Koefisien Determinan	
4.9 Hasil Pembahasan	. 60
RAR V KESIMPIILAN	65
BAB V KESIMPULAN	65

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah masalah sosial lainnya. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita citakan. pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010).

Pengangguran di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah.Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan

yangkurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Jumlah dan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Angkatan Kerja di Aceh Periode Februari Tahun 2007-2017

Tahun	Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (%)	Angkatan Kerja (jiwa)	Pengangguran (jiwa)	Tingkat Penganggur an Terbuka (%)
2007	-			
2008	63.0	105.820	12.090	11.4
2009	62.9	103.018	10.071	9.8
2010	53.7	90.840	10.505	11.6
2011	61.7	104.602	8.916	8.5
2012	57.06	97.973	7.029	7.17
2013	-	-	-	-
2014	59.58	112.067	11.475	10.24
2015	61.05	115.696	13.888	12.00
2016	-	-	-	_
2017	60.45	119.439	9.225	7.75

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Banda Aceh Dalam Angka

Angka tingkat pengangguran terbuka di Banda Aceh sudah mengalami penurunan yang signifikan hingga ke angka 7,75 % pada tahun 2017. Meski mengalami penurunan drastis, dimana pada tahun 2015 masih berada di angka 12 %. Tingkat pengangguran dikota banda aceh mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 13.888 jiwa turun sebesar 9.225 jiwa pada tahun 2017.

Jumlah dan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Aceh Periode Februari Tahun 2000-2017

	Tingkat Partipasi	Tingkat		
Tahun	Angkatan Kerja	Pengangguran		
	(%)	Terbuka (%)		
2007	62.12	9.84		
2008	60.32	9.56		
2009	62.5	8.71		
2010	63.17	8.37		
2011	63.78	7.43		
2012	61.77	9.1		
2013	62.07	10.3		
2014	63.06	9.02		
2015	63.44	9.93		
2016	64.26	7.57		
2017	65.59	7.39		
2018	64.98	6.55		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Banda Aceh Dalam Angka

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami stagnanisasi dimana data tersebut menunjukkan bahwasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik turun dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah pengangguran selama 10 tahun terakhir mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun.

Menurut data dari *Badan Pusat Statistik (BPS)*Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di Indonesia mencapai 6,87 juta orang atau sekitar 5,13 persen dari total penduduk Indonesia.Walaupun dalam laporan tersebut pengangguran pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Tetapi tetap saja ekonomi Indonesia

masih terjebak dalam permasalahan utama ekonomi yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini terus menerus menganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini telah terjebak dalam sebuah masalah klasik yaitu pengangguran.

Menurut data dari*Badan Pusat Statistik (BPS)* Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)pada bulan Februari2018 yaitu 5,13% dimana penggangguran yang ada di kota sebesar 6,34 % dan di desa sebesar 3,72%, turun dibandingkan dengan kondisi pada bulan Agustus tahun 2017 yang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50% dimana pengangguran yang ada di kota sebesar 6,79% dan di desa sebesar 4,01%, kondisiTingkat Pengangguran Terbuka (TPT)pada Februari 2018 lebih baik dibaik dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 sebesar 5,61% dimana penggangguran yang ada di kota sebesar 6,60 % dan di desa sebesar 4,51%.

Pembangunan desa adalah upaya yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat yang sejahtera. Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri (Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3).

Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Sri Mulyani indrawati :2017).

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang denganpengelolaan Dana Desa yang baik.(Sri Mulyani indrawati :2017)

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), pada tahun 2018 seluruhnya berjumlah Rp64.464.666.000. Adapun gampong yang menerima dana desa terbesar adalah Gampong Lambaro Skep kecamatan Kuta Alam yaitu sebesar Rp902.402.075, disusul dengan gampong Ceurih kecamatan Ule kareng sebesar Rp896.258.305, kemudian gampong peuniti kecamatan Baiturrahman sebesar Rp894.037.556. Kemudian ada gampong Ilie kecamatan ulee kareng dengan dana desa yang berjumlah Rp848.627.341. Selanjutnya gampong Pante Riek kecamatan Lueng Bata dengan dana desa yang berjumlah 835.067.091 dan gampong Baatoeh kecamatan lueng bata dengan mendapatkan dana desa sebesar Rp818.247.010.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depanakan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin.Selain itu, regulasi yang disusunpun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, danakuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desadapat terwujud.

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DI PROVINSI ACEH

N o	Nama Daerah	Jumla h Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
	Bactan	II Desa	Per Desa	PerKab/Kot a	Tormura	
1	2	3	4	5=(3*4)	6	7=(5+6)
	Kab.Aceh Barat	322	720.44 2	231.982.3 24	8.754.52 3	240.736.84 7
	Kab.Aceh Besar	604	720.44 2	435.146.9 68	11.966.8 04	447.113.77 2
	Kab.Aceh Selatan	260	720.44 2	187.314.9 20	9.730.47 1	197.045.39 1
	Kab.Aceh Singkil	116	720.44 2	83.571.27 2	6.328.99 9	89.900.271

5.	Kab.AcehTen gah	295	720.44 2	212.530.3 90	8.544.93 1	221.075.32 1
6.	Kab.Aceh	385	720.44	277.370.1	9.444.30	286.814.47
	Tenggara		2	70	3	3
7.	Kab.Aceh	513	720.44	369.586.7	15.040.2	384.626.96
	Timur		2	46	14	0
8.	Kab. Aceh	852	720.44	613.816.5	21.497.8	635.314.44
0.	Utara	052	2	84	52	1
9.	Kab. Bireun	609	720.44	438.749.1	15.128.7	453.877.91
	Ruo. Bircuii	007	2	78	36	4
10	Kab. Pidie	730	720.44	525.922.6	16.470.6	542.393.27
	las. Trais	750	2	60	10	0
11	Kab.	138	720.44	99.420.99	6.807.79	106.228.78
	Simeulue	150	2	6	3	9
	Kota. Banda	90	720.44	64.839.78	6.083.66	70.923.443
	Aceh	70	2	0	3	70.725.115
13	Kota. Sabang	18	720.44	12.967.95	4.320.40	17.228.363
	2101111 211011112	10	2	6	7	17.220.000
14	Kota. Langsa	66	720.44	47.549.17	6.622.47	54.171.651
	220 tun 2011800		2	2	9	0 1117 1100 1
15	Lhokseumawe	68	720.44	48.990.05	6.677.91	55.667.967
			2	6	1	
16	Kab. Gayo	136	720.44	97.980.11	7.423.11	105.403.22
	Lues		2	2	0	2
	Kab.AcehBara	152	720.44	109.507.1	6.591.89	116.099.00
	t daya		2	84	0	74
18	Kab. Aceh	172	720.44	123.916.0	6.599.31	130.515.33
	Jaya	1,2	2	24	1	5
	Kab. Nagan	222	720.44	159.938.1	8.260.50	168.198.62
	Raya		2	24	4	8
	Kab.AcehTam	213	720.44	153.454.1	8.895.13	162.349.28
	ieng	_10	2	46	7	3
	Kab.BenerMe	232	720.44	167.142.5	7.208.44	174.350.98
	riah		2	44	4	8
	Kab. Pidie	222	720.44	159.938.1	7.813.79	164.751.92
	Jaya		2	24	8	2
23	Kota.Subulusa	82	720.44	59.076.24	5.648.22	64.724.470
	lm		2	4	6	
	TotalProvinsi	6.49	720.44	4.680.711.	211.860.	4.892.571.7
	Aceh	7	2	674	121	95

Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan rincian dana desa untuk 90 gampong di Kota Banda Aceh melalui peraturan walikota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2018. Dana desa tersaebut diperioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi produk unggulan gampong atau kawasan desa.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan gampong (DPMG),besaran dana desa untuk 90 desa di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 seluruhnya berjumlah RP64.464.666.000.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Apabila alokasi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. maka pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan(Sri Mulyani indrawati :2017).

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya bagaimana peran dana desa terhadap tingkat pengangguran. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pustaka bagi para peneliti selanjutnya dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan selanjutnya oleh kalangan akedemisi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran yang terjadi di kota-kota lainnya, terutama peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah Kota Banda Aceh untuk memutuskan kebijakan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran melalui pemanfaatan dari dana desa di kota Banda Aceh.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengangguran

Penganguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja. Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan dan ini mencangkup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang di ajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung.

Masalah akan pengangguran tidak pernah ada habisnya dari masa ke masa. Permasalahan pengangguran ini telah menjadi permasalahan utama dalam suatu disiplin ilmu yaitu ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing pemerintahan diseluruh dunia dimulai dari memperbaiki iklim investasi agar investasi masuk dan berbagai kebijakan lainnya yang mendukung tenaga kerja lokaltetapi masalah ini tetap juga tidak berhasil dipecahkan.

Menurut data dari *Badan Pusat Statistik (BPS)*Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di Indonesia mencapai 6,87 juta orang atau sekitar 5,13 persen dari total penduduk Indonesia.Walaupun dalam laporan tersebut pengangguran pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Tetapi tetap saja ekonomi Indonesia

masih terjebak dalam permasalahan utama ekonomi yaitu pengangguran. Masalah pengangguran ini terus menerus menganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini telah terjebak dalam sebuah masalah klasik yaitu pengangguran.

Menurut data dari *Badan Pusat Statistik (BPS)* Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)pada bulan Februari2018 yaitu 5,13% dimana penggangguran yang ada di kota sebesar 6,34 % dan di desa sebesar 3,72%, turun dibandingkan dengan kondisi pada bulan Agustus tahun 2017 yang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50% dimana pengangguran yang ada di kota sebesar 6,79% dan di desa sebesar 4,01%, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)pada Februari 2018 lebih baik dibaik dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 sebesar 5,61% dimana penggangguran yang ada di kota sebesar 6,60 % dan di desa sebesar 4,51%.

Permasalahan pengangguran ini tetap melekat dalam permasalahan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (2006) dikebanyakan negara masalah utama yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Mekanisme pasar tidak mampu mengatasi masalah ini dan selanjutnya sebagian ahli ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan: kebijakan fiskal,kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran.

Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menja ditopik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa

kebijaka nyang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.

Keadaan yang ideal, diharapkan besarnya kesempatan kerjasama dengan besarnya angkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Pada kenyataannya keadaan tersebut sulit untuk dicapai. Umumnya kesempatan kerja lebih kecil dari pada angkatan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan, maka timbullah penggangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal.

Pada Teori Klasik ia menjelaskan ada dua alasan yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

1) Kekakuan Tingkat Upah

Serikat-serikat buruh tidak bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, ketika mereka bersedia menerima tingkat upah yang lebih rendah, maka permintaan terhadap tenaga buruh akan meningkat, sehingga pengangguran dapat diturunkan.

2) Kekakuan yang kedua muncul dari pihak pengusaha besar, yang meningkatkekuatan monopolinya, sehingga mereka lebih leluasa menentukan tingkat harga

2.1.2 Jenis-jenis pengangguran

 Pengangguran dapat dikelompokan menurut sumber atau penyebabnya pengangguran menurut cara ini tedapat empat jenis pengangguran yaitu :

1.1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, jumlah pengangguran rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sedangkan pengusaha sulit memperoleh pekerja. Untuk itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal inilah yang akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari kerja baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur.

1.2. Pengangguran Silikal

Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat mengalami penurunan. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga

akan mengalami kemerosontan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaa-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah.

1.3. Pengangguran Struktual

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang akibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor yaitu munculnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur.

1.4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya.Contohnya racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lainnya.Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubah, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil.Di pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia.

Pengangguran dapat juga dikelompokkan menurut ciri pengangguran yang berlaku.
 Menurut cara ini terdapat empat jenis pengangguran yaitu:

2.1 Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan.Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.Efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.Mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu.Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu Industri.

2.2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi.Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi.Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena

seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. Contoh: Pada sebuah kantor terdapat 10 tenaga administrasi yang menangani pekerjaan yang ada. Padahal dengan jumlah tenaga 6 orang saja semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Akibatnya para pegawai tersebut bekerja tidak optimal dan bagi kantor tentu merupakan suatu pemborosan.Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa.Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor.

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan agar ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.Contohnya keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat sempit. Contoh lain pengangguran tersembunyi adalah orang yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya atau tidak sepadan dengan kemampuannya.

2.3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam satu tahun.Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan perikanan.Biasanya pengangguran seperti itu berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya.Waktu di antara menuai dan masa

menanam berikutnya dan periode di antara sesudah menanam bibit dan masa menuai hasilnya adalah masa yang kurang sibuk dalam kegiatan pertanian.Pada periode tersebut banyak di antara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan suatu pekerjaan.Berarti mereka sedang dalam keadaan menganggur.Jenis pengangguran ini hanya sementara saja, dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu.

2.4. Pengangguran Setengah Menganggur

Setengah Menganggur (*Under Unemployment*).Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Kelebihan penduduk di sektor pertanian di negara-negara berkembang disertai pertambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Salah satu tujuan dari urbanisasi tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di kota-kota. Tidak semua orang yang hijrah ke kota-kota dapat memperoleh pekerjaan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.

3. Masalah Pengangguran dan Krisis Sosial

Berdasarkan teori Fungsional Struktural, masalah sosial timbul karena terjadinya ketidak seimbangan lembaga-lembaga sosial sehingga menyebabkan fungsi lembaga-lembaga tersebut terganggu.Pengangguran dalam hal ini, terjadi akibat kepincangan lembaga ekonomi dan menimbulkan masalah bagi lembaga social.

2.2.1 Dana Desa

Desa dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Widjaja H.A.W. (2012:3)

Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang Pengalokasian Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya Dana Desa akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. Desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini semakin diperlukan seiring dengan minimnya akuntabilitas yang ada di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

akan digunakan untuk membiayai dalam penyelenggaran program pemerintah desa. Pandangan Rosalinda et al (2014) mengenai Dana Desa, yaitu dengan Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk : pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa. (Sri Mulyani indrawati :2017).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan infrastruktur desa.
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

Otonomi daerah menjadi cara untuk memuwujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika ditilik, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Permasalahan yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Keuangan desa pun tak luput dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya:

- 1. Besaran anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kepastian untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa.
- 2. Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh gotong royong atau swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.
- 3. Skema pemberian dan pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan. (Eko, 2007)

Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Sumber daya manusia yang menjadi modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan masyarakat desa. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat

sangat besar. Dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Adanya perubahan paradigma bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya mementingkan akumulasi modal fisik melainkan juga pembentukan modal manusia.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005,h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan, pembangunan fisik juga harus dibarengi dengan pembangunan nonfisik. Menjadi sebuah

tantangan besar dalam memberdayakan masyarakat desa yang dipandang marjinal. Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan atau kekuatan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani. 2004: hal 82)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu (1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan; (2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan. (3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. (4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian. (5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. (6) Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah. (7) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.

(8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit. (9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan. (10) Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan Dana Desa suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Thomas :2013).

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua pihak yaitu masyarakat desa turut ikut ambil bagian di dalam pengembangan desanya. Alokasi Dana Desa juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu kondisi masyarakat yang mandiri.

3. Pengelolaan Dana Desa

Kebijakan ADD yang di titik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan juga mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program program dari pemerintah kabupaten. Dan pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa merupakan mekanisme Dana Desa yang berasal dari APBN sampai masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 2, yaitu Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dimana penyaluran Dana Desa dibagi beberapa tahap pencairan, yaitu:

- 1) Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- 3) Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun

2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Sri Mulyani indrawati :2017).

2.2.2 Dampak Dana Desa

Dana desa dapat berdampak positif apabila dikelola dengan sebaik mungkin dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan antar masyarakat, dan dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dana desa juga dapat berdampak negatif apabila pemerintahan gampong tidak memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan masyarakat dan pembangunan gampong, melainkan hanya untuk keperluan sepihak saja (Pribadi).

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat,pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukse suntuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnyasentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa denganmasyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapibutuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat(Sri Mulyani indrawati :2017).

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan.Dengan adanya dana desa diharapkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang bersumber dari dana desa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Okta Rosalinda LPD (2014) meneliti tentang "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)" dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan atau uji validasi data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh pada Desa Segodorejo elemen-elemen yang terlibat dalam proses perencanaan terlihat lebih berjalan dibandingkan dengan desa Ploso Kerep. Elemen masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa menyebabkan pelaksanaan perencanaan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud partisipasi masyarakat didalam proses perencanaan tersebut. Sebagai pihak yang

ditunjuk oleh masyarakat, aparatur pemerintah desa hendaknya mampu mengorganisir usulan-usulan dari masyarakat sebab setidaknya usulan dari masyarakat tersebut mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat.

Penelitian Mahfudz (mahfudz-fe-undip@yahoo.co.id) Universitas Diponegoro Semarang (2009) "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa". Penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Adapun data primer dikumpulkan melalui teknik survai lapangan kepada responden penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner. Sebagai sampel penelitian adalah masyarakat (pengurus lembaga kemasyarakatan desa). Data yang telah diperoleh tersebut (baik data sekunder maupun data primer) selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Dalam aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD ternyata lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Meskipun saat ini sudah ada regulasi dari Pemerintah Kabupaten 'X' yang mengatur secara rinci tentang penggunaan ADD oleh masingmasing desa, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih banyak yang belum dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

Penelitian Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universtas Brawijaya, Malang *E*-mail: chandra.kusumaputra@yahoo.com yang meneliti tentang "Pengelolaan Alokasi Dana"

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". Menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan meto-de wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. penggunaan ADD tidak sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga peruntukannya.

Penelitian Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, yang meneliti tentang "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015-2016". Informan yang dipilih adalah Kepala Desa dan perankat desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa) dan data sekunder (berupa SPJ serta data lainnya yang berkatian langsung dengan Dana Desa). Metode Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah

mempertaggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan masyarakat.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono,2017: 64). Hipotesisi yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis nol (H0): Pemberdayaan masyarakat tidak ada hubungan dengan tingkat penganngguran di kota banda aceh.

Hipotesis alternatif (Ha): Pemberdayaan masyarakat ada hubungan dengan tingkat pengangguran di kota banda aceh.

- 2. Hipotesis nol (H0) : Pembangunan desa tidak ada hubungan dengan tingkat penganngguran di kota banda aceh.
 - Hipotesis alternatif (Ha) : Pembangunan desa ada hubungan dengan tingkat pengangguran di kota banda aceh.
- 3. Hipotesis nol (H0) : Pengelolaan dana desa tidak ada hubungan dengan tingkat penganngguran di kota banda aceh.
 - Hipotesis alternatif (Ha): Pengelolaan dana desa ada hubungan dengan tingkat pengangguran di kota banda aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekataan deduktif-induktif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014).

3.2 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014:115). Populasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Populasi ditentukan berdasarkan cirri-ciri, karakteristik masyarakat yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang bersumber dari dana desa.

3.3 Teknik Sampling

Sampling dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data yang sifatnya tidak menyeluruh yaitu mencakup seluruh objek penelitian (populasi) tetapi hanya sebagian dari populasi saja. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono 2014:116).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk penentuan sampel adalah teknik Non Probability Sampling. Menurut Sugiyono (2014:120) Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi uungkan untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Sampling, yang dimana Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria masyarakat yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau program yang bersumber dari dana desa tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014).Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probality sampel, dengan melihat karakteristik desa Kota Banda Aceh.Dalam penentuan ukuran sampel dari populasi digunakan rumus yang dikemukakan oleh Slovin (Sugiyono, 2009).

$$n = N$$

$$1 + N(e^{2})$$

Ket:

n = Besar sampel

N = Populasi

e = Nilai kritis yang ditoleransi sebesar 10%

Dari total populasi sebesar 4.096 orang. Maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

$$n = \frac{9.225}{1 + 9.225.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{9.225}{93.25}$$

$$n = 98,92$$
 — Maka dapat dibulatkan menjadi 99 sampel

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakanoleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangkamengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

3.6 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun data primer dikumpulkan melalui teknik survai lapangan kepada responden penelitian dengan menggunakan instrumen wawancara dan Kuinsioner.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan- keterangan yang dapat mendukung penelitian ini (Sugiyono,2014). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu". Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi secara langsung kepada informan (Gorden dalam Herdiansyah, 2010). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam, terperinci dan gambaran jelas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Kota Banda Aceh.

3. Pegamatan (Observasi)

Penngamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang ingin diteliti. Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi.

4. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang berikan (Sulistyo-Basuki, 2006: 110).

3.8 Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono ,2017:38).

Sesuai dengan judul penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh". Maka terdapat dua variable yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel predictor, yang merupakan vaiabel yangdapat mempengaruhi perubahan dalam variable terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif.Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: Dana Desa sebagai Variabel Bebas.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Terikat (Dependent Variable) atau disebut variable kriteria yang menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian.Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: Pengangguran sebagai Variabel Terikat.

3.9 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang dimana ada dua atau lebih variabel bebas (*independen variabel*) dengan satu variabel terikat (*dependent variabel*) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_o + \beta_1 \ X \ _1 + \beta 2 X 2 + \beta 3 X 3 + \ \beta 4 X 4 + \epsilon$$

Berdasarkan formula di atas, maka penelitian yang digunakan adalah:

$$P = \beta_o + \beta_1 PM + \beta_2 PD + \beta_3 PDD + \epsilon$$

Dimana:

P = Pengangguran

 $\beta_o = Intersep/ Konstanta$

 β_1 , β_2 , β_3 , β_4 = Koefisien Regresi

PM = Pemberdayaan Masyarakat

PD = Pembangunan Desa

PDD = Pengelolaan Dana Desa

 $\varepsilon = Error term$

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan dari kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya dapat mendukung suatu kelompok dari variabel tertentu. Sejumlah pertanyaan yang dapat dikatakan valid apabila hasil r Hitung kita bandingkan dengan r Tabel yang dimana df= n-2 dengan sig 5%, jika r Tabel < r Hitung maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan dari kuisisoner adalah valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari kuisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh dari pertanyaan, dan dapat dikatakan data kita raliabilitas apabila nilai Alpha > 0,60 maka reliable.

3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan model regresi linear berganda, dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut dapat memenuhi asumsi normalitasdata dan bebas dari pada asumsi klasik statistic baik itu multikolinieritas, dan heteroskesdastisitas.

1. Uji normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distibusi data dalam variable yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini

adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov(V. Wiratna Sujarweni: 2015).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan antar variable indenpenden dalam suatu model. Kemiripan antar variabel indenpenden akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka dapat di artikan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas(V. Wiratna Sujarweni: 2015).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual dalam suatu periode pengamatan keperiode pengamatan yang lain. Cara memprediksikan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatau model dapat diliht dengan suatu gambar Scatterplot(V. Wiratna Sujarweni: 2015).

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang bertujuan utuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson, dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Criteria jikan du < d hitung < 4-du maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi(V. Wiratna Sujarweni: 2015).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan rincian dana desa untuk 90 gampong di Kota Banda Aceh melalui peraturan walikota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2018. Dana desa tersaebut diperioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi produk unggulan gampong atau kawasan desa.

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden.

4.2 Karakteristik Responden

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data drngan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Karakteristik responden dapat dikelompokan atas dasar dari jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh . Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, dapat diperoleh data yang mengungkapkan distribusi responden berdasarkan karakteristik responden. Dari kuesioner data tersebut dapat terungkap distribusi responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelamin responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	53	53.5%
Perempuan	46	46.5%
JUMLAH	99	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan data diatas bahwa dari 99 orang responden, 53 orang (53.5%) diantaranya adalah responden laki-laki, sedangkan 46 orang (46.5%) lainnya adalah responden perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominsi oleh responden laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah SD, SMP, SMA, Diploma III dan S1. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pendidikan Tertinggi	Jumlah	Presentase
SD	8	8.2%
SMP	16	16.2%
SMA	61	61.2%
D3	5	5.2%
S1	9	9.2%
JUMLAH	99	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan data yang disajikan di atas bahwa dari 99 orang responden dengan 8 orang (8.2%) memiliki pendidikan SD, 16 orang (16.2%) memiliki pendidikan SMP, 61 orang (61.2%) memiliki pendidikan SMA, 5 orang (5.2%) memiliki pendidikan akademik D3, dan 9 orang (9.2%) memiliki tingkat pendidikan S1. Mengacu pada distribusi pendidikan tertinggi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan terbanyak yaitu pendidikan SMA sebanyak 61 orang dari 99 responden.

4.3 Hasil Analisis Data

1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Jumlah responden sebanyak 99.

Tabel 4.3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JUMLAHPM	99	5,00	24,00	18,6364	3,01173
JUMLAHPD	99	15,00	29,00	22,1919	2,53013
JUMLAHPDD	99	3,00	15,00	10,7980	2,18053
JUMLAHP	99	4,00	15,00	11,4040	1,91087
Valid N (listwise)	99				

Sumber: data diolah SPSS:2018

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif dilakukkan dengan membuat nilai rata-rata pada setiap item jawaban.

4.4 Uji Kualitas Data

Proses selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji realiabilitas terhadap masing-masing indikator dari variabel independen dan variabel dependen agar suatu kuesioner dapat dipakai didalam penelitian ini.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Pengujian validitas setiap item pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi *person product moment* antara skor item dengan skor total. Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program *SPSS 20.00 for Windows*. Untuk menguji valid dan tidaknya pernyataan yang akan diajukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel.

- a. Apabila r hitung > r tabel maka pernyataan valid.
- b. Apabila r hitung < r tabel maka pernyataan tidak valid.

Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Dana Desa

Item	rHitung	rTabel	Keterangan
PM1	0.786	0.1663	Valid
PM2	0.719	0.1663	Valid
PM3	0.775	0.1663	Valid
PM4	0.735	0.1663	Valid
PM5	0.757	0.1663	Valid

Sumber: data diolah SPSS:2018

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah0.1663. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang pemberdayaan masyarakat (1-5) adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket pemberdayaan masyarakat adalah Valid.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Pembangunan Desa

Item	rHitung	rTabel	Keterangan
PD1	0.674	0.1663	Valid
PD2	0.696	0.1663	Valid
PD3	0.653	0.1663	Valid
PD4	0.690	0.1663	Valid
PD5	0.418	0.1663	Valid
PD6	0.548	0.1663	Valid

Sumber: data diolah SPSS:2018

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah0.1663. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang pembangunan desa (1-6) adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket pembangunan desa adalah Valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa

Item	rHitung	rTabel	Keterangan
PDD1	0.853	0.1663	Valid
PDD2	0.805	0.1663	Valid
PDD3	0.857	0.1663	Valid

Sumber: data diolah SPSS:2018

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah0.1663. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang pengelolaan dana desa(1-3) adalah

valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket pengelolaan dana desa adalah Valid.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Pengangguran

Item	rHitung	rTabel	Keterangan
P1	0.739	0.1663	Valid
P2	0.775	0.1663	Valid
P3	0.772	0.1663	Valid

Sumber: data diolah SPSS:2018

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah0.1663. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang pengangguran (1-3) adalah valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket pengangguran adalah Valid.

Berdasarkan Hasil diatas maka dapat dijelaskan bahwa rHitung > rTabel (0.1663) dengan demikian maka dapat disimpulkan semua item dalam indikator variabel- variabel penelitian ini (Dana Desa, Pembangunan Desa, Pengelolaan Dana Desa dan Pengangguran) adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dengan cara menghitung *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Untuk menguji reliabel dan tidak dapat diukur dengan melihat Koefisien Alpha Cronbanch. Jika nilai Cronbanch Alpha > 0,60 variabel dikatakan Reliabel, sebaliknya jika nilai Cronbanch Alpha < 0,60 variabel dikatakan tidak reliabel. Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat di tabel 4.4

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Indikator	Nilai r Alpha tabel	Nilai r Alpha hitung	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat	0.60	0.805	Reliabel
Pembangunan Desa	0.60	0.639	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0.60	0.785	Reliabel
Pengangguran	0.60	0.638	Reliabel

Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pengelolaan dana desa dan pengangguran, ternyata diperoleh nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, maka hasil keseluruhan variabel adalah Reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukkan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak normal data pada variabel dependen dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-smirnovtest dengan tingkat signifikansi 0,05 , jika signifikan \leq 0,05 maka data tidak berdistribusi normal(Ghozali, 2011).

Sedangkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0.228 lebih besar dari 0,05,, maka hal ini menunjukan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,15551615
	Absolute	,105
Most Extreme Differences	Positive	,059
	Negative	-,105
Kolmogorov-Smirnov Z		1,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,228

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS:2018

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini untuk menguji adanya multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai tolerance. Menurut Ghozali (2011: 106), bahwa multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF > 10 atau *tolerance value* < 0,10. Hasil perhitungan VIF untuk masing-masing variabel bebas disajikan dalam tabel berikut ini:

b. Calculated from data.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

			Standardi				
			zed				
	Unstar	ndardized	Coefficie			Collin	nearity
	Coef	ficients	nts			Stat	istics
						Toleran	
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	ce	VIF
(Constant)	-1.049	1.073		978	.331		
Pemberdayaan Masyarakat	.273	.052	.433	5.238	.000	.581	1.721
Pembangunan Desa	.340	.064	.450	5.343	.000	.561	1.782
Pengelolaan Dana Desa	014	.064	016	219	.827	.749	1.335

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan hasil tabel 4.10 tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Pemberdayaan Masyarakat (X1) mempunyai nilai Tolerance 0.581 > 0.1 dan nilai
 VIF 1.721 < 10 sehingga bebas dari Multikolonieritas.
- Pembangunan Desa (X2) mempunyai nilai Tolerance 0.561 > 0.1 dan nilai VIF
 1.782 < 10 sehingga bebas dari Multikolonieritas.
- 3) Pengelolaan Dana Desa (X3) mempunyai nilai Tolerance 0.749 > 0.1 dan nilai VIF
 1.335 < 10 sehingga bebas dari Multikolonieritas.

Berdasarkan pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai *tolerance* mendekati 1 atau diatas 0,1.

Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas terjadi apabila tidak ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Deteksi dengan menggunakan uji glejser dilihat dari jika tingkat signifikan seluruh variabel independen > 0,05 maka dikatakan tidak ada masalah heterokedasitas. (Ghozali, 2011). Hasil pengujian heterokedastisitas dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas

p-value	Keterangan
0.223	Bebas Heteroskedastisitas
0.010	Bebas Heteroskedastisitas
0.106	Bebas Heteroskedastisitas
	0.223

Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 4.11 tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas menunjukkan bahwa:

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai hasil bahwa nilai signifikan 0.352 > 0,05
 sehingga dapat dikatakan variabel terbebas dari Heterokedastisitas.

- Pembangunan desa mempunyai hasil bahwa nilai signifikan 0.010 > 0,05 sehingga dapat dikatakan variable terbebas dari Heterokedastisitas.
- Pengelolaan dana desa mempunyai hasil bahwa nilai signifikan 0.092 > 0,05
 sehingga semua variabel terbebas dari Heterokedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang bertujuan utuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson, dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Criteria jikan du < d hitung < 4-du maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

			Adjusted R	Std. Error of	
Model	R	R Square	Square	the Estimate	Durbin-Watson
1	.789ª	.622	.610	1.19298	1.592

a. Predictors: (Constant), JUMLAHPDD, JUMLAHPM, JUMLAHPD

b. Dependent Variable: JUMLAHP Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi diatas menunjukan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.592 yang dimana dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi dari regresi penelitian ini.

4.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 20, Analisis dalam penelitian ini mengunakan persamaan regresi liner berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 1X2 + \beta 3X3 + e$$

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear

Coefficients^a

			Standardi				
			zed				
	Unstandardized		Coefficie			Collin	nearity
	Coefficients		nts			Stat	istics
						Toleran	
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	ce	VIF
(Constant)	-1.049	1.073		978	.331		
Pemberdayaan Masyarakat	.273	.052	.433	5.238	.000	.581	1.721
Pembangunan Desa	.340	.064	.450	5.343	.000	.561	1.782
Pengelolaan Dana Desa	014	.064	016	219	.827	.749	1.335

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan tabel diatas, hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = -1.049 + 0.273 \text{ PM} + 0.340 \text{ PD} - 0.014 \text{ PDD} + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koefisien regresi untuk variabel dana desa sebesar 0.273. Artinya bahwa Pemberdayaan Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

- tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, yang dimana jika Pemberdayaan Masyarakat naik 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.273.
- b. Koefisien regresi untuk variabel pembangunan desa sebesar 0.340. Artinya bahwa pembangunan desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, yang dimana jika pembangunan desa naik 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.340.
- c. Koefisien regresi untuk variabel pengelolaan dana desa sebesar (-0.014). Artinya bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, yang dimana jika pengelolaan dana desa naik 1 persen maka akan menurunkan pengangguran sebesar (-0.014).

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa bernilai positif terhadap tingkat pengngguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Begitu pula dengan variabel pengelolaan dana desa yang bernilai negative terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa masih belum tepat dalam segi pengelolaan dana desa, yang dimana tata kelola dana desa masih

nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan dana desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji F (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan menunjukkan apakah dalam model regresi semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2011). Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji F

ANO	V	\mathbf{A}^{a}
-----	---	------------------

	Sum of		Mean		
Model	Squares	Df	Square	F	Sig.
1 Regression	222.634	3	74.211	52.144	.000 ^b
Residual	135.205	95	1.423		
Total	357.838	98			

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

b. Predictors: (Constant), DANA DESA, PEMBANGUNAN DESA,

PENGELOLAAN DANA DESA

Sumber: Output SPSS:2018

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa F hitung > F tabel yang dimana 52.144 > 2.699 dan nilai sig 0.000 dibadingkan dengan α = 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel bebas yaitu Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa, dan pengelolaan dana desa secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat pengangguran di Kota Banda aceh.

4.6.2 Uji T (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali,2011). Kriteria pengujian hipotesis secara parsial, kriteria uji t yang digunakan adalah:

- 1) Jika *thitung > t tabel*, maka Ho ditolak, dan Ha diterima, berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Jika *thitung* < *t tabel*, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.15

Hasil Uji T

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-1.049	1.073		978	.331
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	.273	.052	.433	5.238	.000
PEMBANGUNAN DESA	.340	.064	.450	5.343	.000
PENGELOLAAN DANA DESA	014	.064	016	219	.827

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji t untuk variabel Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan desa dan pengelolaan dana desa terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran. Disini dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan nilai t tabel yaitu (df)= N-3, yang dimana 99-4 = 95. Maka dapatlah t tabel yaitu sebesar 0.1996. Berdasarkan t tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada variabel pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai t Hitung sebesar 5.238 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat lihat bahwa t Hitung > t Tabel yang berarti bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima, dapat dikatakan variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Maka ada hubungan atau signifikan antara variabel pemberdayaan masyarakat terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.
 - 2) Pada variabel pembangunan desa memiliki nilai t Hitung sebesar 5.343 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa t Hitung > t Tabel yang berarti bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima, dapat dikatakan variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan atau signifikan antara variabel pembangunan desa terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.
- 3) Pada variabel pengelolaan dana desa memiliki nilai t Hitung sebesar -0.219 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa t Hitung < t Tabel yang berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, dapat dikatakan variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan atau tidak signifikan antara variabel

pengelolaan dana desa terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa bernilai positif terhadap tingkat pengngguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan pengaruh atau dampak yang baik terhadap tingkat pengangguran, baik itu dalam segi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada variabel pengelolaan dana desa tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.

4.7 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan mengenai besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan hasilnya disajikan pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summarvb

1.10001							
			Adjusted R	Std. Error of the			
Model	R	R Square	Square	Estimate			
1	.789ª	.622	.610	1.19298			

A. Predictors: (Constant), Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

Desa, Pengelolaan Dana Desa

B. Dependent Variable: Pengangguran

Sumber: Output SPSS:2018

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0.622. Hal ini dapat di artikan bahwa sebesar 62% variasi variabel pengangguran dapat dijelaskan oleh variable pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa,dan pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 38% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

4.8 Hasil Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang Pengaruh Dana Desa Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uji diatas yang menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan dana desa dan pengelolaan dan desa terhadap tingkat pengangguran.

Hasil dari regresi untuk variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 0.273. Artinya bahwa Pemberdayaan Masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang dimana jika Pemberdayaan Masyarakat naik 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.273. Dan pada tingkat pengujian signifikan uji t pada variabel pemberdayaan masyarakat memperoleh nilai t Hitung sebesar 5.238 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat lihat bahwa t Hitung > t Tabel yang berarti bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima, dapat dikatakan variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Maka ada hubungan atau signifikan antara variabel pemberdayaan masyarakat terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa pemberdayaan masyarakat bernilai positif terhadap tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan pengaruh atau dampak yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Walaupun masih belum secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mendukung Penelitian Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universtas Brawijaya, Malang E-mail: chandra.kusumaputra@yahoo.com yang meneliti tentang "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". Hasil dalam penelitian ini yaitu secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pembedayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menun-jukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendi-dikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum ter-bentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

Hasil dari regresi untuk variabel pembangunan desa sebesar 0.340. Artinya bahwa pembangunan desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, yang dimana jika pembangunan desa naik 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.340. Dan pada tingkat pengujian signifikan uji t pada variabel pemberdayaan masyarakat memiliki nilai t Hitung sebesar 5.343 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa t Hitung > t Tabel yang berarti bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima, dapat dikatakan variabel

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan atau signifikan antara variabel pembangunan desa terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa pembangunan desa bernilai positif terhadap tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa, banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh baik itu di RW, Dusun, dan Desa. Peningkatan kegiatan pembangunan membawa dampak positif utamanya pada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang didanai bersumber dari dana desa, baik tenaga kerja dibayar maupun gotong royong. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat pada kegiatan yang didanai dari dana desa sangat tergantung pada volume kegiatan fisik pada tahun yang bersangkutan pada masing. Dengan Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

Hasil dari regresi untuk variabel pengelolaan dana desa sebesar (-0.014). Artinya bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh, yang dimana jika pengelolaan dana desa naik 1 persen maka akan menurunkan pengangguran sebesar (-0.014). Pada pengujian tingkat signifikan pada uji t variabel pengelolaan dana desa memiliki nilai t Hitung sebesar -0.219 dan t Tabel sebesar 0.1996. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa t Hitung < t Tabel yang berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, dapat dikatakan variabel

independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan atau tidak signifikan antara variabel pengelolaan dana desa terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran Di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pada variabel pengelolaan dana desa yang bernilai negative terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa masih belum tepat dalam segi pengelolaan dana desa, yang dimana tata kelola dana desa masih nampak belum efektif, dan pengelolaannya dilaksanakan belum secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa yang kurang memperhatikan masyarakatnya dalam pemanfaatan dana desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, yang meneliti tentang "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015-2016". Hasil dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertaggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum

(BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberberdayaan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil dari variabel bebas yaitu pemberdayaan masyarakat bernilai positif terhadap tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan pengaruh atau dampak yang baik terhadap pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program dari dana desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat dan ada juga desa-desa yang memberikan modal untuk usaha. Walaupun masih belum secara keseluruhan dalam segi pemberdayaan masyarakat desa.
- 2. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat bahwa pembangunan desa bernilai positif terhadap tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa dapat memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh baik itu di RW, Dusun, dan Desa. Peningkatan kegiatan pembangunan membawa dampak positif utamanya pada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang didanai bersumber dari dana desa, baik tenaga kerja dibayar maupun gotong royong. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat pada kegiatan yang didanai

dari dana desa sangat tergantung pada volume kegiatan fisik pada tahun yang bersangkutan pada masing. Dengan Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

3. Berdasarkan hasil pada variabel pengelolaan dana desa yang bernilai negative terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran, maka dapat diartikan bahwa dana desa masih belum tepat dalam segi pengelolaan dana desa, yang dimana tata kelola dana desa masih nampak belum efektif, dan pengelolaannya dilaksanakan belum secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa dibagikan berdasarkan jumlah pembagian alokasi dasar (90%) dan formula (10%) dari anggaran Dana Desa. Penambahan dana desa yang lebih baik yang dimana dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan bedasarkan jumlah penduduk desa sebanyak 25%, angka kemiskinan desa sebanyak 35%, luas wilayah sebanyak 10% dan dilihat dari tingkat kesulitan geografis desa tersebut desa sebanyak 30%. Jika pengalokasiannya tidak dilakukan dengan baik maka dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan aspek pemerataan. Dan juga belum mencerminkan keberpihakan pada desa yang tertinggal dan desa yang sangat tertinggal yang dimana merupakan fokus pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dana desa dapat memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap tingkat pengangguran dikota banda aceh, baik itu dari segi pemberdayaan masyarakat maupun dari segi pembangunan desa, karena dengan adanya dana desa dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan. Walaupun masih belum secara keseluruhan yang dimana masih banyak fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa masih belum adanya pemerataan dalam pembagian pekerjaan di setiap program-program kegiatan yang bersumber dari dana desa dalam segi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diajukan dari hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana desa dapat berdampak positif apabila dikelola dengan sebaik mungkin dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat, dan dapat meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Agar pelaksanaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan aturan sehingga menghasilkan pembangunan yang lebih baik, diperlukan seluruh masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan di desa serta turut memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan bukan hanya masyarakat yang dekat dengan perangkat desa saja tapi seluruh masyarakat yang ada di desa harus ikut serta dalam setiap program-

program yang bersumber dari dana desa, dengan begitu maka dapat membantu masyarakat yang miskin dan dapat memberika kesempatan kerja pada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

- 2. Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah Kota Banda Aceh untuk memutuskan kebijakan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran melalui pemanfaatan dari dana desa di kota Banda Aceh. Adanya pengawasan pemerintah setempat dalam mengawasi setiap kegiatan atau program-progam yang bersumber dari dana desa supaya tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa, yang dimana pemerintahan gampong tidak memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan sepihak saja (Pribadi) melainkan untuk keperluan masyarakat dan pembangunan gampong.
- 3. Bagi masyarakat deangan adanya dana desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar melalui dana desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

REFERENSI

Mahfudz,2009 Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Semarang

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Malang

Okta Rosalinda LPD,2014Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Malang

Moh. Sofiyanto,Ronny Malavia Mardani,M. Agus Salim,2015-2016 Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Malang

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta. Sri Mulyani,2017 Buku Pintar Dana Desa. Jakarta Pusat

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sujarweni V Wiratna, 2015, SPSS untuk PENELITIAN, Pustaka Baru Press, Yogyakarta Wahjudin, Sumpeno (2011) Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh,Reinforcement Action and Development.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader PemberdayaanMasyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH DANA DESA DALAM MENGURANGI TINGKAT

PENGANGGURAN

DI KOTA BANDA ACEH

Terima kasih kepada Ibu/Bapak karena telah ikut berpartisipasi dalam penelitian

skripsi saya tentng "Pengaruh Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di

Kota Banda Aceh". Bapak/Ibu sebagai masyarakat kota Banda Aceh diminta untuk

memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Berikan jawaban hanya menandai salah satu jawaban yang telah disediakan di masing-

masing pertanyaan (tanda $\sqrt{\ }$).

Survey ini dibuat atas kenyamanan bersama. Partisipasi anda murni atas dasar

kerelaan tanpa adanya pemaksaan dan bisa mengundurkan diri kapan saja tanpa penalti.

Informasi yang didapatkan hanya untuk keperluan penelitian dan kami tidak berhak

membocorkan data yang mengarah kepada data pribadi anda. Berikut ini Skala yang

dipakai untuk mendefinisikan pengukuran dari jawaban yaitu:

Keterangan:

SS : Sangat Setuju (5)

S : Setuju (4)

N: Netral (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

71

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama :
Desa/ Kelurahan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :

A. Pemberdayaan Masyarakat

1.	Dengan adanya dana desa dapat memperbaiki lingkungan dan permukiman desa			
2.	Dana desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa			
3.	Menurut anda dengan dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa.			
4.	Dana desa dapat mengatasi kesenjangan antar masyarakat desa			
5.	Dana desa dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa			

B. Pembangunan Desa

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Melibatkan masyarakat dalam segi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa					
2.	Setiap kegiatan/ program yang bersumber dari dana desa sangatlah bermanfaat.					

3.	Adanya Peningkatan Pembangunan infrastruktur wilayah/ desa secara bertahap						
4.	Anda merasakan hasil pembangunan desa yang bersumber dari dana desa						
5.	Pembangunan desa/wilayah tidak merata di setiap sector yakni sektot material dan non material						
6.	Dana desa memiliki dampak positif bagi pembangunan wilayah desa/ kelurahan						
C.	Pengelolaan Dana Desa						
C.	Pengelolaan Dana Desa Pertanyaan	ST	S	N	TS	STS	
	_	ST	S	N	TS	STS	
No	Pertanyaan	ST	S	N	TS	STS	

D. PENGANGGURAN

NO	PERTANYAAN	S	S	N	TS	STS
1.	Dana desa dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.					
2.	Anda terlibat dalam proses dana desa					
3.	Dana desa salah satu cara yang efektif dalam mengatasi pengangguran					

KETERANGAN:

X1 : Pemberdayaan Masyarakat

X2 : Pembangunan Desa

X3 : Pengelolaan Dana Desa

Y: Pengangguran

X 1	X 1	X 1	X 1	X 1	Tota 1	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2	Tota l	X 3	X 3	X 3	Tota 1	Y	Y	Y	Tota 1
5	4	4	4	5	22	4	4	4	4	4	4	24	2	2	2	6	4	5	4	13
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	9	3	3	3	9
5	2	4	4	4	19	2	4	4	4	4	2	20	4	2	4	10	5	4	2	11
4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	12
4	3	4	2	3	16	5	4	4	3	4	4	24	4	5	4	13	3	4	5	12
4	3	4	3	3	17	4	4	4	3	3	4	22	4	3	4	11	3	2	4	9
4	3	4	2	3	16	5	4	4	3	4	4	24	3	5	4	12	3	4	5	12
4	4	4	3	4	19	4	4	4	2	2	4	20	3	2	2	7	4	3	4	11
4	4	4	5	1	18	5	4	5	2	1	4	21	1	1	1	3	4	2	5	11
5	4	5	4	4	22	4	4	4	5	2	2	21	4	4	4	12	5	4	4	13
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	4	22	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	12	4	3	4	11
4	4	4	4	4	20	2	4	4	3	4	4	21	4	4	3	11	4	2	2	8
4	4	4	2	4	18	4	4	4	3	2	4	21	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	2	4	18	4	4	4	4	2	2	20	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	3	4	19	2	4	4	4	4	3	21	4	4	4	12	4	2	2	8
1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	4	2	15	4	4	4	12	2	1	1	4
5	4	5	4	5	23	4	5	5	4	4	5	27	4	5	5	14	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	3	21	4	4	4	12	4	2	4	10
5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	4	3	23	5	4	4	13	5	3	4	12
4	3	4	4	4	19	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	2	2	4	20	2	3	2	7	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	3	21	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	4	4	20	5	5	4	4	3	5	26	5	4	5	14	5	4	5	14
4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	3	4	23	3	3	3	9	4	4	4	12
4	4	5	4	5	22	4	5	4	4	2	4	23	5	4	4	13	5	2	4	11
5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	4	4	28	4	4	4	12	5	3	5	13
4	2	4	1	3	14	4	4	4	3	3	5	23	4	3	3	10	4	3	4	11
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	5	5	3	22	4	5	4	3	3	3	22	4	2	3	9	4	4	4	12
4	4	4	3	3	18	4	4	3	4	3	4	22	4	5	3	12	4	3	4	11
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	12	4	4	4	12
2	2	2	2	2	10	2	2	2	4	4	2	16	2	4	2	8	2	2	2	6
4	2	4	4	3	17	4	4	4	3	3	3	21	4	4	2	10	2	2	4	8
4	4	4	3	4	19	4	4	3	3	3	3	20	3	3	3	9	3	3	4	10
2	2	2	2	2	10	2	4	2	2	2	3	15	2	2	2	6	2	2	2	6
2	2	5	4	4	17	4	4	4	3	3	2	20	2	4	2	8	2	4	4	10
5	5	4	5	4	23	4	4	4	4 5	3	4	23	4	4	4	12	5	5	4	14
5	4	4	5	4	22	4	4	4	5	3	4	24	4	4	4	12	5	5	4	14
5	5	4	4	4	22	4	5	4	4	2	4	23	4	4	4	12	5	5	4	14
4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	3	4	23	4	3	4	11	5	5	4	14

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Penelitian





Desa Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda aceh





Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda aceh





Gampong Jawa

Kecamatan Kuta Raja

Kabupaten Kota Banda aceh





Gampong Beurawe

Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Kota Banda aceh





Gampong Bitai

Kecamatan Jaya Baru

Kabupaten Kota Banda aceh



Desa Pelanggahan



Gampong Blang



Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kabupaten Kota Banda Aceh